

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djuncto ko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenadia Media Group, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Memberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta .
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A.V Dicey, 2007, *Introduction to the study of the law of the constitution (Pengantar Hukum Konstitusi)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Nusa Media, Bandung.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sugono, 2005, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjuncto juncto , 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.

Carl juncto achim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Chaerul Amin, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Dyatmiko Soemodihardjuncto, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Ecep Nurjamal, 2023, *Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, Edu Publisher, Jakarta.

Edi Yunara, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Elwi Danil, 2021, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fahmiron, 2017, *Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor*, Rajawali Pers, Depok.

Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

H.F. Abraham Amos, 2007, *Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Van Hoecke, 2011, *Methodologies of Legal Research*, Hart Publishing, Oxford.

Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta.

Moh Choirul Rizal, 2015, *Kajian-Kajian tentang Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Lov Rinz, Cetakan 1, Jakarta.

Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Paulus Effendi Lotulung, 2012, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2004. *Rekonstruksi Teori Hukum dan Korupsi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Satjipto Rahardjuncto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Suharsini Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekidjuncto Notoatmojuncto, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjuncto no Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

S. Wojuncto wasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar baru, Jakarta.

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).

C. Jurnal

Ade Mahmud, 2019, *Strategi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti*, Nagari Law Review, Vol.03, No.01.

Agnes Levina Sesa, at.all., 2024, *Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus pidana Korupsi di Kota Blitar*, Unes Law Review Vol.07., No.01., hlm.451

Aulia, 2024, “ *Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspektif Yang Berkeadilan*”, Rio Law Jurnal Vol.05. No.02.

Arief B. Sidharta, 2006, *Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 Tahun III,

Aryo Fadlian, 2020, *Peranggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2

Deby Shinta Wulan, 2024, “ *Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No. 4.

Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja ,at.all., 2024, “ *Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023*” ,JURNAL HUKUM INDONESIA, Vol. 3 No 3.

Dina Mariana, Olga, 2022, *Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Ilmiah Pendidikan, Vol.5, No.8

Edita Elda. 2019. *“Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 2.

Harly Clifford, 2024, *“Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara”*, LUTUR Law juncto urnal, Vol.05, No.02.

Irwan Nevada, 2024, *“Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang Properti Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tingkat Penyidikan”*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 3, No 3.

Karesya, 2024, *Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Legal Certainty In The Criminal PreTrial System For Witnesses Of Corruption Criminal Acts, Rewang Rencang*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No.10 .

Liliana, 2022, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 75/PID.SUS/TPK/2016/PN.MDN.)* , Diponegoro Law juncto urnal Vol. 11, No 4.

M Dhani, at.all., 2024, *“Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”*, Ta’zir : Jurnal Hukum Pidana, Vol,08 , No.01.

Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. 2017. *“Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi”*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19, No.1.

Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, 2024, *Implementasi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi (studi kejaksaaan negeri donggala)*, Jurnal ilmu hukum toposantaro, Vol 01, No.02.

Nastiti Rahajeng, 2018, *Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Unisula, Vol 6, No. 1,

Nani Mulyati, 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Vol.02, No.02.

Rahma Noviyanti, 2019, *“Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Nagari Law Review, Vol.02, No.02 .

Refki Saputra, 2017, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non conviction Based Asset Forfeiture*) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia,” *Integritas* Vol. 3, No. 1.

Siti Aisyah dan Atikah Rahmi, 2023, *Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Unes Law Review*, Vol.06 No. 02.

Toman, Faisal, 2020, *Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Dengan Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. IV, No. 2

Vially Aviano dan Lola Yustrisia, “Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 10, No. 2, 2024, hlm.398

Wendy, Andi Najemi, ,2020, “pengaturan uang pengganti sebagai pidana tambahan tindak pidana korupsi”, *pampas juncto urnal of criminal law*, vol. 1, No.2.

Wisnu Adi Purwoko, kebijakan formolsi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi di indonesia, *Magistra Law Review* Vol.04 No.02.

D. Internet

Kompas, *sModus. Operandi. Korupsi. di. Daerah.*, <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi.korupsi.di.daerah>.

Penemuan hukum oleh hakim,
<https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>

